

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, ETNIS, DAN LATAR BELAKANG
PENDIDIKAN TERHADAP ENVIRONMENTAL DISCLOSURE:
STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN LISTING
DI BURSA EFEK INDONESIA**

Djoko Suhardjanto
Jurusan Akuntansi FE Universitas Sebelas Maret, Surakarta
E-mail: suhardjanto04@yahoo.com

Novita Dian Permatasari
Jurusan Akuntansi FE Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Abstract

The purpose of this study is to examine relationship between corporate governance and its environmental disclosures. Corporate governance are identified as the proportion of independent commissioner, the ethnic of commissioner president, the educational background of commissioner president, the number of commissary board meeting, the proportion of independent audit committee, and the number of audit committee meeting. This study includes industry type and firm size as control variable. Companies' environmental disclosures are measured by using the Indonesian Environmental Reporting index that developed by Suhardjanto, Tower and Brown (2007).

Under proportional random sampling method, 90 Indonesian listed companies' annual reports are selected. From the sample, there is fourthy nine percent (49%) disclosed environmental information with level of five point four percent (5.4%). This study employed a data testing technique: classical assumption, descriptive statistic, and hypothesis test using logistic regression, multiple regression, t-test, and ANOVA.

Analysis of statistical results the proportional of independent commissioner, the ethnic of commissioner president and the firm size are as significant predictors to environmental disclosure.

Keywords: *corporate governance, independent commissioners, independent audit committee, environmental disclosure.*

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* dengan *environmental disclosure*. Penelitian yang berkaitan dengan pelaporan lingkungan hidup (*environmental disclosure*) telah mengalami peningkatan secara signifikan sejak empat dekade terakhir (Bates, 2002; Welford, 1998). Beberapa penelitian terdahulu dilakukan untuk menguji keterkaitan antara mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan informasi lingkungan hidup, yaitu Eipstein dan Freedman (1994), Belkoui (2000), Komar (2004), Simon dan Wong (2001), Eng dan Mak (2003), dan Haniffa dan Cooke (2005) namun belum banyak penelitian *environmental disclosure* di negara berkembang.

Pada beberapa tahun terakhir ini, Indonesia mengalami peningkatan permasalahan pencemaran lingkungan

hidup (Suratno, Darsono, dan Mutmainah, 2006). Pencemaran lingkungan hidup ini dapat dilihat dari berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini, seperti banjir bandang di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tanah longsor di Desa Sijeruk Jawa Tengah dan daerah lainnya di Jawa dan Sumatera, serta kebakaran hutan di beberapa hutan lindung Kalimantan. Bahkan munculnya banjir lumpur bercampur gas sulfur di daerah Sidoarjo Jawa Timur merupakan bukti rendahnya perhatian perusahaan terhadap dampak lingkungan hidup (Ja'far, 2006).

Permasalahan lingkungan hidup menjadi perhatian yang serius, baik oleh konsumen, investor, maupun pemerintah. Pada umumnya, para investor lebih tertarik pada perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan hidup yang baik dan tidak mengabaikan masalah pencemaran lingkungan (Ja'far, 2006). Kepentingan bisnis yang menunjukkan reputasi, kredibilitas, dan *value added* bagi perusahaan di mata *stakeholder* menjadi dorongan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan hidup di *annual report* (Eipstein dan Freedman, 1994). Hal ini seperti dilakukan oleh PT Fajar Surya Wisesa Wisesa dalam *annual report*nya.

Proses produksi yang dijalankan FajarPaper merupakan perpaduan antara teknologi moderen dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Fasilitas pembangkit listrik berkekuatan 32,5 MW dan 35 MW yang dimiliki mampu menghasilkan energi secara efisien dan hemat karena menggunakan bahan bakar gas alam dengan emisi yang lebih bersih (AR PT Fajar Surya Wisesa, 2007).

Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan hidup (Suhardjanto, 2008), akibatnya banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan aktivitas lingkungannya (Anggraini, 2006). Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik menjadi salah satu faktor pendorong yang memunculkan akuntansi pertanggungjawaban lingkungan hidup (Eng dan Mak, 2003).

Proporsi komisaris independen atas jumlah seluruh anggota dewan komisaris merupakan variabel yang sering digunakan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *environmental disclosure*. Penelitian Chen dan Jaggi (1998) menunjukkan terdapat hubungan positif antara proporsi komisaris independen atas jumlah seluruh anggota dewan komisaris dan *environmental disclosure*.

Karakteristik personal komisaris utama juga mempengaruhi *environmental disclosure*. Hal ini dijelaskan oleh penelitian Haniffa dan Cooke (2005), yang menunjukkan adanya hubungan antara pengungkapan informasi lingkungan dengan faktor dominan komisaris utama pribumi yang menduduki jabatan tersebut.

Latar belakang pendidikan komisaris utama yang mempunyai pendidikan bisnis (keuangan) juga menjadi variabel penentu. Komisaris utama yang mempunyai latar belakang pendidikan bisnis biasanya berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki. Meskipun bukan menjadi suatu keharusan bagi pelaku usaha untuk punya pendidikan bisnis namun akan lebih baik jika anggota dewan komisaris memiliki latar belakang pendidikan bisnis (Kusumastuti, Supatmi, dan Sastra, 2006).

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Forcker, 1992). Dengan adanya komite audit, perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga pengungkapan informasi dalam *annual report* akan diperluas sesuai dengan aktivitas perusahaan (Simon dan Wong, 2001). Dalam menjalankan tugasnya, komite audit sedikitnya mengadakan pertemuan 4 kali dalam satu tahun (*corporate governance guidelines*, 2007). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja komite audit sehingga hasilnya dapat maksimal.

Oleh karena belum banyak penelitian *environmental disclosure* dilakukan di Indonesia namun di sisi lain makin parahnya pencemaran lingkungan hidup maka penelitian tentang akuntansi lingkungan hidup khususnya *environmental disclosure* menjadi penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *environmental disclosure*. *Environmental disclosure* diukur dengan menggunakan bobot atau index pengungkapan. Bobot *environmental disclosure* yang digunakan menggunakan *Indonesian Environmental Reporting Index* (IER) hasil penelitian dari Suhardjanto, Tower dan Brown (2007). Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance*, budaya serta latar belakang pendidikan terhadap *environmental disclosure*.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Environmental Disclosure

Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban mempunyai fungsi sebagai alat kendali utama terhadap aktivitas perusahaan. Tanggung jawab manajemen tidak terbatas pada pengelolaan dana ke dalam perusahaan kepada investor dan kreditor, tetapi juga meliputi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Environmental disclosure adalah pengungkapan informasi di dalam laporan tahunan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Suratno dkk, 2006). Zhegal dan Ahmed (1990) mengidentifikasi bahwa pelaporan lingkungan hidup meliputi antara lain pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan, konservasi alam dan pengungkapan lain yang berhubungan dengan lingkungan.

Pengungkapan lingkungan hidup juga merupakan respon terhadap kebutuhan informasi dari berbagai kelompok yang berkepentingan (*interest groups*) seperti serikat pekerja, aktivis lingkungan hidup, kalangan religius dan kelompok lain (Guthrie dan Parker, 1990). *Environmental disclosure* merupakan wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan (Hadi, 2006). Melalui pengungkapan lingkungan hidup, stakeholder perusahaan dapat memantau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dengan cara demikian, perusahaan akan memperoleh perhatian, kepercayaan dan dukungan dari stakeholder sehingga perusahaan dapat tetap eksis (Parsons, 1996).

Pengungkapan informasi lingkungan hidup perusahaan masih bersifat *voluntary, unaudited dan unregulated* (Mathews, 1984). Namun demikian, banyak institusi yang telah menawarkan model yang bisa dijadikan pedoman, diantaranya adalah *Global Reporting Initiatives* (GRI). GRI merekomendasikan beberapa aspek lingkungan yang harus diungkapkan dalam *annual report*. Ada 30 item yang direkomendasikan oleh GRI dan terdiri dari 9 aspek utama. Kesembilan aspek tersebut adalah: material, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi dan limbah, produk dan jasa, ketaatan pada peraturan, transportasi, serta keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pentingnya pengungkapan informasi lingkungan hidup (*environmental disclosure*) berkaitan dengan adanya kontrak (perjanjian) sosial (*social contract*). Kontrak antara perusahaan dengan stakeholdernya, baik yang sifatnya eksplisit maupun implisit yang timbul karena interaksi perusahaan dengan lingkungan hidup, membawa konsekuensi perusahaan harus bertanggungjawab tidak hanya terhadap kesejahteraan pemegang saham, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup (Belkaoui, 2000).

2.2. Corporate Governance

Corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder* (Kaihatu, 2006).

Beberapa aspek penting dalam *corporate governance* adalah dewan komisaris dan komite audit. Sistem pengawasan yang ada pada perusahaan di Indonesia terletak pada dewan komisaris, hal tersebut disebabkan Indonesia menganut *two-board system*. Keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris ini didukung dengan keberadaan komisaris independen dalam komposisi dewan komisarisnya. Barry (1999) menyatakan bahwa komisaris independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan makmur.

Karakteristik personal seorang komisaris utama mempengaruhi praktik *disclosure* (Alhabsi, 1994). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chuah (1995), pemikiran seorang komisaris utama dipengaruhi oleh latar belakang ras dan *culture*, serta latar belakang pendidikan dan tipe organisasi dimana dia bekerja.

Peran pengawasan yang dilakukan dewan komisaris perusahaan di Indonesia belum memadai (Herwidayatmo, 2000). Untuk itu diperlukan suatu komite untuk membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite ini disebut Komite Audit. Tugas dan fungsi komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. McMullen (1996), keberadaan anggota komite audit independen dalam komite audit akan meningkatkan transparansi komite audit dalam menjalankan tugasnya. Agar tugas dan tanggungjawabnya berjalan dengan baik, komite audit harus rutin mengadakan pertemuan atau rapat internal.

2.3. Pengembangan Hipotesis

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *environmental disclosure*. Enam variabel *corporate governance* digunakan dalam penelitian ini.

1.1.1. Proporsi Komisaris Independen

Peran utama dewan komisaris adalah terkait dengan fungsi kontrol (Pound, 1995). Anggota komisaris independen merupakan alat untuk mengawasi perilaku manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan perusahaan (Rosenstein dan Wyatt, 1990). Dalam penelitian Chen dan Jaggi (1998), menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Leftwich, Watt dan Zimmerman (1981), Fama dan Jansen (1983), Forker (1992). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₁ : Terdapat pengaruh positif proporsi komisaris independen terhadap *environmental disclosure*.

1.1.2. Latar Belakang Culture Atau Etnis Komisaris Utama

Latar belakang etnis (*culture*) komisaris utama direpresentasikan dengan loyalitas kelompok etnik yang berada pada kelompok yang terdiri dari kumpulan orang yang mempunyai pola tingkah laku normatif (Cohen, 1974). Indonesia merupakan negara dengan banyak ras dan salah satu yang mempunyai kontribusi besar dalam dunia bisnis di Indonesia adalah etnis Tionghoa (Kusumastuti dkk, 2006). Karakteristik personal seorang komisaris utama mempengaruhi praktek *disclosure* (Alhabsi, 1994). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chuah (1995), pemikiran seorang komisaris utama dipengaruhi oleh latar belakang ras dan *culture*. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Terdapat pengaruh latar belakang etnis atau budaya (*ethnic/culture*) komisaris utama terhadap *environmental disclosure*.

1.1.3. Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh komisaris utama berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki (Ahmed and Nicholls, 1994). Komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis akan lebih baik dalam mengelola bisnis dan mengambil keputusan (Bray, Howard, dan Golan, 1995). Dari uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Terdapat pengaruh latar belakang pendidikan komisaris utama terhadap *environmental disclosure*.

1.1.4. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan *corporate governance guidelines* yang ditetapkan 12 September 2007, dewan komisaris harus memiliki jadwal rapat tetap dan dapat dilakukan rapat tambahan sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan pada saat yang tepat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brick dan Chidambaram (2007), semakin banyak rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Dari argumen tersebut di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₄ : Terdapat pengaruh positif jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.

1.1.5. Proporsi Anggota Independen Komite Audit

Audit komite mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan sebagai elemen sistem pengendalian (Collier, 1993). Anggota independen komite audit selayaknya tidak terafiliasi dengan perusahaan atau komite lainnya, sehingga kinerjanya dapat dipercaya (McMullen, 1996). Penelitian Forker (1992) menyatakan bahwa keberadaan anggota independen komite audit meningkatkan kualitas kontrol perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simon (2001) bahwa anggota independen komite audit berpengaruh positif terhadap luasnya *disclosure*. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Terdapat pengaruh positif antara proporsi anggota independen komite audit terhadap *environmental disclosure*.

1.1.6. Jumlah Rapat Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, komite audit sebaiknya mengadakan rapat minimal empat kali dalam satu tahun (*corporate governance guidelines*, 2007). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selain tercantum dalam *corporate governance guidelines*, dalam *audit committee charter* tahun 2005 juga dinyatakan bahwa semakin banyak rapat komite audit yang dilakukan akan semakin meningkatkan kinerja komite audit. Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis seperti berikut:

H₆ : Terdapat pengaruh positif jumlah rapat komite audit terhadap *environmental disclosure*.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2007, yaitu sebesar 380 perusahaan. Penggunaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi karena perusahaan tersebut mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada *stakeholders*, sehingga memungkinkan data laporan tahunan tersebut diperoleh.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random berbasis alokasi proporsional untuk meyakinkan sampel representatif dari semua sektor industri (Haniffa dan Cooke, 2005), yaitu *service*, *finance*, dan *manufacture* termasuk *mining*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebesar 90 perusahaan.

3.2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan tahun 2007. Laporan tahunan dipilih karena memiliki kredibilitas yang tinggi, selain sebagai sumber utama informasi yang pasti (Deegan dan Rankin, 1997), dan dapat diakses untuk tujuan penelitian (Woodward, 1998).

Data sekunder juga dikumpulkan dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD), *IDX* dan dari situs masing-masing perusahaan sampel.

3.3. Pengukuran dan Definisi Operasional

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *environmental disclosure*. Dalam penelitian ini *environmental disclosure* diukur dengan menggunakan skor pengungkapan *environmental disclosure*. Skor diberikan pada setiap item pengungkapan aktivitas lingkungan hidup yang terdapat dalam *annual report*. Bobot skor yang digunakan menggunakan *Indonesian Environmental Reporting Index* (IER) hasil penelitian dari Suhardjanto, Tower, dan Brown (2007). Sedangkan untuk pengukuran variabel independen menggunakan pengukuran instrumen seperti dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1.
Pengukuran Variabel Independen

Variabel	Pengukuran
Proporsi komisaris Independen (Prop_DKI)	Presentase \sum komisaris independen dari \sum seluruh anggota dewan komisaris
Latar belakang <i>culture</i> atau etnis komisaris utama (LBC_KU)	1= Pribumi, 2= Tionghoa, dan 3= Lainnya.
Latar belakang pendidikan Komisaris Utama (LBP_KU)	1= Bisnis atau keuangan, dan 0= lainnya.
Jumlah rapat dewan komisaris dalam satu tahun.	Seluruh jumlah rapat dewan (Rapat_DK)
Proporsi anggota independen komite audit	Presentase \sum komite audit (Prop_KAI) independen dari \sum seluruh anggota komite audit.
Jumlah rapat komite audit audit dalam satu tahun.	Seluruh jumlah rapat komite (Rapat_KA)
Ukuran Perusahaan (Asset)	Total asset
Tipe Industri (TI)	1= Jasa, 2= Keuangan, dan 3= Manufaktur dan lainnya.

3.4. Metode Analisis Data

Analisis statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif, *logistic regression*, *multiple regression*, t-test, dan ANOVA. Pengujian dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 16.

4. HASIL ANALISIS DATA

1.1. Analisis Deskriptif

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebesar 380 perusahaan, yaitu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2007. Berdasarkan data diketahui bahwa dari 90 perusahaan yang menjadi sampel terdiri dari 17% perusahaan jasa, 19% perusahaan keuangan, dan 64% merupakan perusahaan manufaktur. Diketahui pula bahwa dari perusahaan sampel yang ada hanya terdapat 44 perusahaan dengan *environmental disclosure* atau sebesar 49%. Terdapat 7 perusahaan jasa, 3 perusahaan keuangan, dan 33 perusahaan manufaktur yang mengungkapkan informasi lingkungan hidup.

Dari ke-44 perusahaan dengan *environmental disclosure*, sektor keuangan merupakan sektor yang paling sedikit mengungkapkan informasi lingkungan hidup. Namun demikian, Bank Permata mengungkapkan kegiatan lingkungan hidup dengan baik dalam *annual reportnya*,

Untuk mengundang partisipasi karyawan, setiap departemen saling bersaing memperebutkan *Green and Clean Award* yang didasarkan pada prinsip 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan penghargaan diberikan kepada yang terbaik dan terburuk di setiap lokasi utama Permata Bank. Selama tahun 2007, Permata Bank juga melaksanakan berbagai acara termasuk bekerjasama dengan WWF dalam seminar interaktif `Permata Bank peduli *Global Warming*`, `Tips Gaya Hidup Hijau Ala Permata Bankers`, *Eco-Bussiness Tourism* yaitu kegiatan benchmarking ke perusahaan yang ramah lingkungan, in-house training OHSAS 18001:2007 dan SO 14001:2004 (Integrated EHS Management System) untuk mensosialisasikan penerapan OHSAS 18001:2007 di Permata Bank tahun 2008 dan *Awareness Vendor* dengan tema Green Building (AR Bank Permata, 2007).

Tabel 2 menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia yang mengungkapkan informasi lingkungan rata-rata sebesar 5,40%. Nilai rata-rata pengungkapan sebesar 5,40% menunjukkan bahwa kesadaran untuk mengungkapkan *environmental information* pada *annual report* masih sangat rendah. Bobot minimum pengungkapan adalah 0,59% (PT Tira Austenite dan PT Adira Dinamika Muti Finance) dan bobot maksimum 11,20%. Berikut ini contoh pengungkapan oleh PT Tira Austenite (industri jasa),

Planting of trees in the areas around in the company offices, to reflect the company's concern for global warming and to conserve the environmental around the company (AR PT Tira Austenite, 2007).

Tabel 2.
Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian

Variabel	Min	Max	Mean	Std.deviasi
ED	0,59	11,20	5,40	2,62
Prop_KI	25,00	100,00	42,93	15,06
Rapat_DK	2	77	9,23	12,06
Prop_KAI	25,00	100,00	55,61	22,92
Rapat_KA	1	104	10,26	13,27
Firm Size (dalam jutaan)	314.993	312533200	17257907	46089452

Sumber: Data diolah.

Item penghijauan merupakan item terbanyak kedua yang diungkapkan setelah item *programs for protections*. Terbukti dengan adanya 32 perusahaan yang mengungkapkan pada laporan tahunan. Hal ini kemungkinan disebabkan program penghijauan merupakan item lingkungan hidup yang mudah dilakukan dan menggunakan biaya yang rendah.

Nilai maksimum atau bobot tertinggi *environmental disclosure* sebesar 11,20% dilakukan oleh PT Inco dengan mengungkap 11 item dari 35 item pengungkapan IER. Kemungkinan hal ini dikarenakan PT Inco merupakan perusahaan pertambangan yang aktivitas operasi utamanya bersinggungan langsung dengan alam sehingga mendapat banyak sorotan dari stakeholder.

Item terbanyak yang diungkapkan, *Program for Protections* merupakan rencana yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga lingkungan hidup akibat aktivitas perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada 38 perusahaan yang mengungkapkan item tersebut, diantaranya adalah PT Semen Gresik Tbk. PT Semen Gresik Tbk dalam *annual reportnya* menyatakan,

In performing its environmental management activities, the following strategy has been implemented by the Company, to include:

- *Environment Monitoring Program*
- *Environment Management Program*
- *Resources Conservation Program*
- *Implementing management system related to environment*
- *Clean Development Mechanism (CDM) Implementation (AR PT Semen Gresik Tbk, 2007)*

Belum lama ini telah diselenggarakan konferensi *Global Warming and Climate Change* di Nusa Dua Bali yang berlangsung mulai tanggal 1 November sampai dengan 15 November 2007 dan diikuti oleh banyak negara. Ada beberapa poin penting dalam konferensi ini, diantaranya adalah kesediaan negara peserta konferensi untuk mengurangi emisi gas. Indonesia sebagai salah satu negara peserta konferensi yang sangat *concern* dalam *global warming*. *Issue global warming* ditangkap oleh PT Inco dengan pengungkapan sebagai berikut:

Suatu contoh yang signifikan adalah keberhasilan kami dalam proyek bernilai \$62 juta yang telah selesai pada tahun 2007 di mana kami telah berhasil menekan tingkat emisi debu yang keluar dari seluruh tanur listrik sesuai dengan mandat dari pemerintah (AR PT Inco, 2007).

Aspek GRI 2002 yang sama sekali tidak diungkapkan dalam *annual report* adalah mengenai kegiatan transportasi. Hal ini dimungkinkan karena aspek transportasi belum menjadi topik atau isu menarik bagi perusahaan.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan, ada sekitar 43% anggota dewan komisaris berasal dari komisaris independen. Hal ini sesuai dengan peraturan Bapepam tanggal 1 Juli tahun 2000, bahwa proporsi komisaris independen adalah 30% dari total anggota dewan komisaris. Tabel 2 menunjukkan, rata-rata ukuran perusahaan sebesar Rp 17.257.907 juta. Dari seluruh sampel dalam penelitian ini, terdapat 47 perusahaan (52,22%) yang mempunyai ukuran perusahaan di atas nilai rata-rata dan 47,78% sisanya mempunyai nilai di bawah rata-rata.

Tabel 3.
Statistik Variabel Independen Nominal

Persentase Perusahaan Sampel	
LBC_PK Latar belakang <i>culture</i> komisaris utama:	
Pribumi	62
Tionghoa	32
Negara Lainnya	6
LPB_PK Latar belakang pendidikan komisaris utama:	
Bisnis atau keuangan	52
Lainnya	48

Sumber: Data diolah.

Tabel 3 menunjukkan bahwa latar belakang etnis komisaris utama yang berasal dari etnis pribumi sebesar 62%, 32% berasal dari etnis Tionghoa, dan sisanya sejumlah 6% berasal dari etnis lainnya. Pada tabel 3 juga menunjukkan bahwa komisaris utama dengan latar belakang pendidikan bisnis atau keuangan sebesar 52% sedangkan yang mempunyai latar belakang pendidikan non-bisnis sebesar 48%. Dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa rata-rata jumlah rapat dewan komisaris sebesar 9,23 kali dalam setahun.

Secara keseluruhan, perusahaan *go public* di Indonesia mempunyai proporsi komite audit independen sekitar 56% dari seluruh jumlah anggota komite audit. Sedangkan jumlah rapat komite audit sebesar 10,26 kali dengan jumlah minimal 1 kali dan maksimal 104 kali dalam setahun.

4.2. Logistic Regresion

Tujuan pengujian *logistic regression* adalah mengetahui variabel independen mana yang menentukan ada dan tidaknya *environmental disclosure* pada *annual report*.

Tabel 4 menunjukkan bahwa *predictive value* dari model ini adalah sebesar 11,50% (perhitungan Nagelkerke R Square = 0,115) dan bentuk model ini kuat karena hasil uji Hosmer dan Lemeshow menunjukkan nilai 4,605 dan dengan signifikansi 0,799. Hasil uji Hosmer dan Lemeshow dikatakan kuat apabila nilai signifikansi > 0,05 (Ghozali, 2003). Dari analisis *logistic regression* ini menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan yang merupakan variabel determinan *environmental disclosure*. Hasil ini konsisten dengan penelitian Suhardjanto (2008). Semakin besar perusahaan akan semakin besar pula sorotan stakeholder terhadap kegiatan pelestarian lingkungan hidup oleh perusahaan. Karena perusahaan besar mempunyai potensi besar dalam menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Tabel 4.
Hasil Logistic Regression

No	Variabel	Signifikansi
1	Nagelkerke R Square	0,115
2	Hosmer and Lemeshow test	0,799
3	Proporsi Komisaris Independen	0,732
4	Latar Belakang <i>Culture</i> Komisaris Utama	0,618
5	Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama	0,292
6	Rapat Dewan Komisaris	0,464
7	Proporsi Anggota Independen Komite Audit	0,555
8	Rapat Komite Audit	0,475
9	Ukuran Perusahaan	0,035*
10	Tipe Industri	0,797

* Secara statistik signifikan pada tingkat 0.05

Sumber: Data diolah.

4.3. Multiple Regression

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variable independen terhadap variabel dependen, *environmental disclosure*. Hasil pengujian hipotesis penelitian ini disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Coef.	t	Sig
Constant	-9,851	-2,376	0,022*
Proporsi Dewan Komisaris Independen	0,045	1,818	0,077**
Latar Belakang <i>Culture</i> Presiden Komisaris	1,186	2,171	0,036*
Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama	0,026	0,005	0,974
Rapat Dewan Komisaris	-0,003	-0,090	0,924
Proporsi Anggota Independen Komite Audit	-0,022	-1,447	0,156
Rapat Komite Audit	-0,011	-0,540	0,572
Ukuran Perusahaan	0,934	2,701	0,010*
Tipe Industri	0,519	1,035	0,307
R Square			0,349
Adjusted R Square			0,300
F			7,134
Sig			0,001

* Secara statistik signifikan pada tingkat 0,05; ** Secara statistik signifikan pada tingkat 0,10

Sumber: Data diolah.

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* adalah 0,300. Berdasarkan nilai *Adjusted R²* tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 30% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya sebanyak 70% dijelaskan oleh faktor lain. Nilai F hitung sebesar 7,134 dengan probabilitas 0,001 (<0,05) mempunyai arti bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Tabel 5 juga menunjukkan bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi *environmental disclosure* adalah latar belakang etnis komisaris utama dengan *p-value* sebesar 0,036; ukuran perusahaan dengan *p-value* 0,010 (tingkat signifikansi 5%), dan proporsi komisaris independen (*p-value* = 0,077) pada tingkat signifikansi 10%.

4.4. D. T- Test dan ANOVA

Pengujian tambahan, uji beda t digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Dalam penelitian ini, uji beda t dilakukan terhadap variabel ukuran perusahaan yaitu total aset. Pada Tabel 6 terlihat bahwa nilai t pada equal variance assumed adalah 1,699 dengan probabilitas signifikansi 0,097. Jadi dapat disimpulkan bahwa *environmental disclosure* berbeda secara signifikan antara kelompok perusahaan besar (dengan total aset di atas *mean*) dan perusahaan kecil (di bawah *mean*).

Tabel 6.
Hasil Uji Beda t

	Levene`s Test Equality of Variance		T-test for Equality of Means	
	F	Sig	T	Sig.(2-tailed)
ED				
Equal variance assumed	0,214	0,646	1,699	0,097
Equal variance not assumed			1,657	0,108

Sumber: Data diolah.

ANOVA digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen (skala metrik) dengan satu atau lebih variabel independen (skala nonmetrik atau kategorikal dengan kategori lebih dari dua). Dalam penelitian ini, ANOVA diujikan terhadap variabel latar belakang etnis komisaris utama. Hasil Tukey HSD maupun Bonferroni (Tabel 7) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan *environmental disclosure* antara perusahaan dengan komisaris utama etnis pribumi dengan komisaris utama etnis lain dengan rata-rata perbedaan *environmental disclosure* 3,8630 dan signifikan dengan *p-value* = 0,037. Sedangkan perbedaan *environmental disclosure* antara komisaris utama etnis tionghoa dan komisaris utama etnis lain sebesar 3,5763 dan secara statistik signifikan pada 10%. Namun tidak ada perbedaan *environmental disclosure* antara komisaris utama etnis pribumi dan komisaris utama etnis Tionghoa sebesar 0,906 (*p-value* = 0,946 jauh di atas 0,05).

Tabel 7.
Hasil Anova
Post Hoc test

	LBC_PK	LBC_PK	Mean Difference	Sig
Tukey HSD	1	2	-0,2867	0,946
		3	-3,8630	0,037
	2	1	0,2867	0,946
		3	-3,5763	0,087
	3	1	3,8630	0,037
		2	3,5763	0,087
Bonferroni	1	2	-0,2867	1,000
		3	-3,8630	0,042
	2	1	0,2867	1,000
		3	-3,5763	0,105
	3	1	3,8630	0,042
		2	3,5763	0,105

Sumber: Data diolah.

4.5. Hasil Pengujian Hipotesis

Proporsi komisaris independen berpengaruh secara statistik pada level 10% terhadap pengungkapan informasi lingkungan hidup dalam *annual report*. Hal ini mengindikasikan bahwa peran dan tanggung jawab dewan komisaris independen pada perusahaan telah berfungsi sebagaimana mestinya. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, Leftwich et al 1981; Fama dan Jansen 1983; Rosenstein dan Watt 1990; Forker 1992; dan Chen dan Jaggi 1998.

Variabel *corporate governance* lain yang berpengaruh terhadap *environmental disclosure* adalah latar belakang etnis komisaris utama (signifikan pada tingkat 5%). Hal ini konsisten dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2005). Perilaku perusahaan termasuk dalam praktik pengungkapan dipengaruhi latar belakang etnis komisaris utama. Hasil ini didukung dengan uji ANOVA, yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan *environmental disclosure* antara komisaris utama dengan latar belakang etnis pribumi dengan etnis lainnya.

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada tingkat signifikansi 5%. Beberapa penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure* karena perusahaan besar cenderung mempunyai permintaan informasi yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil (Andrew et al, 1989; Suhardjanto, 2008). Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan uji beda t (Tabel 10) dan uji *logistic regression*.

Latar belakang pendidikan komisaris utama ternyata tidak mempengaruhi luas pengungkapan informasi lingkungan hidup. Hasil ini sesuai dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2005); Kusumastuti dkk (2007). Tidak adanya pengaruh ini disebabkan dalam penelitian ini hanya mendefinisikan latar belakang pendidikan secara spesifik pada bisnis dan keuangan, padahal ada kemungkinan latar belakang pendidikan komisaris utama sesuai dengan jenis usaha perusahaan yang dapat menunjang kelangsungan bisnis perusahaan lebih diperlukan.

Jumlah rapat dewan komisaris tidak mempengaruhi *environmental disclosure*. Hal ini dapat diindikasikan bahwa peran rapat dewan komisaris belum sebagaimana yang diharapkan. Proporsi anggota independen komite audit juga tidak berpengaruh pada pengungkapan tambahan tentang informasi lingkungan hidup perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Suhardjanto (2008).

Variabel independen jumlah rapat komite audit secara statistik tidak signifikan. Sama halnya dengan rapat dewan komisaris, rapat komite audit belum berfungsi secara maksimal dikarenakan ada kecenderungan bahwa hal tersebut hanya merupakan wujud kepatuhan terhadap aturan saja. Atau dengan kata lain, fungsi rapat belum bermakna seperti yang diharapkan. Selain itu, jumlah rapat komite audit juga bukan merupakan ukuran dalam menilai keefektifan komite audit dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Menon dan Williams, 1994).

Variabel tipe industri tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto (2008). Akan tetapi, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Eng dan Mak (2003).

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dari jumlah sampel sebesar 90 perusahaan hanya terdapat 44 perusahaan (49%) yang mempunyai *environmental disclosure* (dengan level rerata 5,40%). Hal ini mengindikasikan bahwa pengungkapan *environmental disclosure* masih sangat rendah. Item pengungkapan yang paling sering diungkapkan adalah item *programs of protections* dan item yang sama sekali tidak diungkapkan dalam *annual report* adalah berkenaan dengan aspek transportasi.
2. Hasil pengujian *logistic regression* menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan merupakan faktor yang menentukan diungkapkan atau tidaknya *environmental disclosure* pada *annual report*.
3. Faktor yang dapat mempengaruhi besarnya tingkat atau level pengungkapan didasarkan hasil pengujian regresi berganda adalah sebagai berikut:
 - a. Variabel Proporsi komisaris independen secara statistik signifikan pada tingkat 10%. Hal ini

mengindikasikan bahwa peran dan tanggung jawab komisaris independen pada perusahaan di Indonesia telah berfungsi sebagai mana mestinya.

- b. Variabel Latar belakang *culture* komisaris utama berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Hal ini dikarenakan pemikiran dan tindakan seperti keuletan dan kegigihan komisaris utama dipengaruhi oleh ras dan *culture*.
- c. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada tingkat 5%. Hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mendapat perhatian besar dari stakeholder seperti media, pembuat keputusan dan regulasi sehingga mereka akan lebih memperluas praktik *disclosure* daripada perusahaan kecil.

5.2. Implikasi Kebijakan

Beberapa saran dan implikasi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tingkat *environmental disclosure* di Indonesia masih sangat rendah, oleh karena itu sebaiknya para *stakeholder* lebih perhatian terhadap peningkatan pengungkapan informasi lingkungan hidup. *Mandatory disclosure* merupakan alternatif terbaik untuk mendorong perusahaan mau mengungkapkan informasi lingkungan hidup. Hal ini bisa membantu mencegah kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah di Indonesia.
2. Oleh karena proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap *environmental disclosure*, sebaiknya jumlah dan/atau peran komisaris independen dalam suatu perusahaan lebih ditingkatkan agar perhatian ke aspek pelestarian lingkungan hidup lebih besar.
3. Sebaiknya dalam penunjukkan atau pengangkatan seorang komisaris perlu memperhatikan latar belakang personal misal kegigihan, keuletan seperti yang biasa dimiliki oleh etnis tertentu.
4. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi lingkungan hidup, oleh karena itu perusahaan besar lebih didorong untuk lebih meningkatkan pengungkapan informasi lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C.A., dan Harte, G. (1998), "The changing portrayal of the employment of women in British banks and retail companies corporate annual reports", *Accounting, Organizations and Society*. Vol. 23 (80): 781–812.
- Anggraini, R.R., (2006), "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta)", makalah dalam *Symposium Nasional Akuntansi IX* (Padang).
- Bates, G.M., (2002). *Environmental Law in Australia*. Sydney: Butterworths.
- Belal, A., Rahman, ., (2000), "Environmental Reporting in Developing Countries: Empirical evidence from Bangladesh", *Eco-Management and Auditing*. Vol. 7 (3): 114.
- Chen, C.J.P., Jaggi, B., (2000), "Association between independent non-executive directors, family control and financial disclosures in Hong Kong", *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 19: 285–310.
- Chinn, R., (2000), *Corporate Governance Handbook*, Gee Publishing Ltd. London.
- Chuah, B.H., (1995), "The unique breed of Malaysian managers", *Management Times*, New Straits Times Press: Malaysia. March 7-6.
- Cohen, A., (1974), *Two-Dimensional Man*, Routledge and Kegan Paul, London.
- Collier, P., (1993), "Factors affecting the formation of audit committees in major UK listed companies", *Accounting and Business Research*. Vol. 23 (91): 421–430.
- Davis, K., dan William C.F., (1984). *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*. 5th ed, New York : Mc.Graw Hill.

- Deegan, C., dan Rankin, M., (1997), "The materiality of environmental information to users of annual reports", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 10 (4): 562–583,
- Donaldson, T., Preston, L., (1995), "The stakeholder theory of the corporation—concepts, evidence, and implications", *Academy of Management Review*, Vol. 20 (1): 65–92,
- Eipstein, M.J., dan Freedman, M., (1994), "Sosial Disclosure and the Individual Investor", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 7 (4): 94-108.
- Eng, L.L., dan Mak, Y.T., (2001), "Corporate Governance and Voluntary Disclosure", *Journal of Accounting and Public Policy*, ELSEVIER. 325-345.
- Fama, E.F., Jensen, M.C., (1983), "Separation of ownership and control", *Journal of Law and Economics*, Vol. 26 (2): 301–325.
- Freedman, M., dan Jaggi, B., (1992), "An Investigation of The Long-Run Relationship Between Pollution Performance and Economic Performance: the Case of Pulp-and-Paper Firms", *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 3 (4): 315-336.
- Freedman, M., dan Wasley, C., (1990), "The Association Between Environmental Performance and Environmental Disclosure in Annual Reports and 10-Ks", *Advances in Public Interest Accounting*, Vol. 3: 183-193.
- Finch, N., (2005), *The Motivations for Adopting Sustainability Disclosure*, Macquarie Graduate School of Management. Social Science Research Network.
- Foo, S.L., Tan, M.S., (1988), "A comparative study of social responsibility reporting in Malaysia and Singapore", *Singapore Accountant*, August 12–15,
- Forker, J.J., (1992), "Corporate Governance and Disclosure Quality", *Accounting and Business Research*, Vol. 22 (86): 111-124.
- Gujarati, D.N., (2003), *Basic Econometrics*, Forth Edition., New York: Mc.Graw-Hill.
- Guthrie, Jand Parker. L.D., (1990), "Corporate Social Reporting: A rebuttal of Legitimacy Theory", *Accounting and Business Research*., Vol.19 (76): 343-351.
- Haniffa and Cooke., (2005), "The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting", *Journal of Accounting and Public Policy*, Elsevier. 391-430.
- Hayuningtyas, Putri., (2007), "Karakteristik Perusahaan, dan Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan", *Skripsi*, FE UNS.
- Hendriksen, Eldon, and M. Van Brenda., (2001), *Accounting Theory*. USA: Mc.Graw-Hill
- IAI. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ja`far, Muhammad., (2006), "Pengaruh Dorongan Manajemen Lingkungan, Manajemen Lingkungan Proaktif dan Kinerja Lingkungan terhadap Public Environmental Reporting", *Simposium Nasional Akuntansi IX (Padang)*.
- Kaihatu, T.S., (2006), "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Universitas Kristen Petra Surabaya. www.petra.ac.id. 06-09-2008.
- Kusumastuti, Supatmi, dan Sastra., (2007), "Pengaruh Board Diversity terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance", *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Universitas Kristen Petra Surabaya. www.petra.ac.id. 06-09-2008.
- Mathews, M. R., (1985), "Social and Environmental Accounting : A practical demonstration of ethical concern", *Journal of Business Ethics*, Vol.14: 663-671.

- McMullen, D. A., (1996), "Audit committee performance: an investigation of the consequences associated with audit committee", *Auditing: A Journal of Theory and Practice*, Vol. 15 (1): 87–103.
- Menon and Williams., (1994), "The Use of Audit Committees for Monitoring", *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 13: 121-139.
- Monks, R.A.G., and Minow, N., (2003), *Corporate Governance 3rd edition*, Blackwell Publishing.
- Naim, Ainun, dan F. Rakhman., (2000), "Analisis Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesi*, Vol.15 (1): 70-82.
- Neimark, M.D., (1992), *The Hidden Dimensions of Annual Reports*, Paul Chapman: London.
- Pflieger, Juli; Matthias Fischer; Thilo Kupfer; Peter Eyerer., (2005), "The contribution of life cycle assessment to global sustainability reporting of Organization", *Management of Environmental*, Vol. 16 (2).
- Reliant Energy Inc., (2007), "Corporate Governance Guidelines", www.ssm.com. 06-09-2008.
- Roberts, C., (1992), "Environmental disclosures: A note on reporting practices in mainland Europe", *Accounting, Auditing and Accountability*, Vol. 4 (3): 62–71.
- Rosenstein, S., & Wyatt, J. G., (1990), "Outside directors, board independence and shareholder wealth" *Journal of Financial Economics*, Vol. 26: 175–192.
- Setyawan, Surya., (2005), "Konteks Budaya Etnis Tionghoa dalam Manajemen Sumber Daya Manusia", *Jurnal Manajemen dan Bisnis BENEFIT*, Vol. 9 (2): 164 – 170. BPPE FE UMS.
- Shaw, John, C., (2003), *Corporate Governance and Risk : A system approach*, John Wiley and Sons. Inc. New Jersey.
- Simon, S.M. Ho, dan Wong., (2001), "A Study of Relationship Between Corporate Governance structures and The Extent of Voluntary Disclosure", *Journal of International Accounting Auditing and Taxation*, ELSEVIER 139-156.
- Solomon, Aris, and Linda Lewis, (2002), "Incentives and disincentives corporate environmental disclosure", *Busines Strategy and The Environment*, Vol. 11 (3): 154.
- Suhardjanto, (2008), "Environmental Reporting Practcies: An Evidence From Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 8 (1): 33-46.
- Suhardjanto, Tower, dan Brown, (2007), "Generating a Uniquely Indonesian Environmental Reporting Disclosure Index Using Press Coverage as an Important Proxy of Stakeholder Demand", *Asian Academic Accounting Association annual conference*, Yogyakarta, Indonesia.
- Suratno, I.B., Darsono, dan Mutmainah, (2006), "Pengaruh Environmental Performance terhadap Environmental Disclosure dan Economic Performance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2004)", *Simposium Nasional Akuntansi IX (Padang)*.
- Triuwono, Iwan., (1997), "Akuntansi Syariah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Amanah", *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol 1 (1): 3-46.
- Walk, H.I., Jere R. Francis, and Michael G. Tearney. (1989), *Accounting Theory: A conceptual and institutional approach. 2nd ed.*, Boston: PWS-Kent Publising.
- Welford, R., (1998), *Corporate Environmental Managemen*, London: Eartscan Publication.
- Woodward, D.G., (1998), "Specification of a content-based approach for use in corporate social reporting analysis", *Southampton Institute working paper*.